

## Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di SMAN 4 Makassar

\*<sup>1</sup>A.Sitti Nur Halisa; <sup>2</sup>Ansar; <sup>3</sup>Sumarlin Mus

\*<sup>1,2,3</sup>Universitas Negeri Makassar, Jl. Tamalate No.14, karunrung, Kec.Rppocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

\*<sup>1</sup>Email : andinurhalisa09@gmail.com

<sup>2</sup>Email : ansar@unm.ac.id

<sup>3</sup>Email : sumarlin.mus@gmail.com

### ABSTRACT

*This study aims to describe the implementation of the Internal Quality Assurance System (SPMI) at SMAN 4 Makassar and to identify the factors supporting and hindering its execution. The study employs a qualitative approach with a descriptive research design. Data were collected through participant observation, in-depth interviews with the principal and the quality assurance team, and document analysis. Data analysis involved data reduction, data presentation, and drawing conclusions followed by verification. The results indicate that the implementation of SPMI at SMAN 4 Makassar has proceeded systematically and in a structured manner across five stages. First, quality standards were established based on National Education Standards and the school's vision, mission, and objectives, involving relevant stakeholders. Second, quality mapping was conducted through School Self-Evaluation, utilizing data on student learning outcomes, program evaluations, teacher supervision, curriculum documents, and evidence of activity implementation to identify achievements and quality gaps. Third, a quality improvement plan was formulated based on the mapping results and the school's priority needs, then aligned with the school's vision, mission, objectives, and work programs. Fourth, quality improvement was implemented through task allocation, dissemination of information, coordination meetings, training, and the active involvement of the school community. This implementation was supported by the revitalization of classrooms, laboratories, and administrative offices, as well as the procurement of smart TVs for technology-based learning. Fifth, monitoring and evaluation were carried out routinely through direct supervision, the use of instruments based on quality standards, document reviews, and evaluation meetings. Evaluation results were used to formulate recommendations, refine programs, and plan future quality improvements. The successful implementation of SPMI was supported by the commitment of the school community, coordination between the principal and the quality assurance team, collaboration, and the availability of facilities and infrastructure. The challenges identified include teachers' limited time and the varying ability of some teachers to use technology. The study concludes that the five stages of the SPMI have established a continuous quality improvement process, although further efforts are still needed regarding the strengthening of technological competencies, time management, and support for the evaluation process.*

### Keywords:

*Quality evaluation, quality mapping, Quality improvement, Standard setting, Internal Quality Assurance System.*

### ABSTRAKS

*Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di SMAN 4 Makassar serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan kepala sekolah dan tim penjaminan mutu, serta analisis dokumen. Data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SPMI di SMAN 4 Makassar telah berlangsung secara sistematis dan terstruktur melalui lima tahapan. Pertama, penetapan standar mutu mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, visi, misi, dan tujuan sekolah*

### Kata Kunci :

*evaluasi mutu, pemetaan mutu, peningkatan mutu, penetapan standar, Sistem Penjaminan Mutu Internal.*

dengan melibatkan pemangku kepentingan. Kedua, pemetaan mutu dilakukan melalui Evaluasi Diri Sekolah dengan memanfaatkan data hasil belajar, evaluasi program, supervisi guru, dokumen kurikulum, dan bukti pelaksanaan kegiatan untuk mengidentifikasi capaian serta kesenjangan mutu. Ketiga, penyusunan rencana peningkatan mutu didasarkan pada hasil pemetaan dan skala prioritas kebutuhan sekolah, kemudian diselaraskan dengan visi, misi, tujuan, dan program kerja sekolah. Keempat, pelaksanaan peningkatan mutu dilakukan melalui pembagian tugas, sosialisasi, rapat koordinasi, pelatihan, dan pelibatan warga sekolah. Pelaksanaan tersebut didukung oleh revitalisasi ruang kelas, laboratorium, ruang tata usaha, serta pengadaan smart TV untuk pembelajaran berbasis teknologi. Kelima, pemantauan dan evaluasi dilaksanakan secara rutin melalui pengawasan langsung, penggunaan instrumen berdasarkan standar mutu, pemeriksaan dokumen, dan rapat evaluasi. Hasil evaluasi digunakan untuk menyusun rekomendasi, memperbaiki program, dan merencanakan peningkatan mutu berikutnya. Keberhasilan implementasi SPMI didukung oleh komitmen warga sekolah, koordinasi kepala sekolah dan tim penjaminan mutu, kerja sama, serta ketersediaan sarana dan prasarana. Kendala yang ditemukan meliputi keterbatasan waktu guru dan kemampuan sebagian guru dalam menggunakan teknologi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kelima tahapan SPMI telah membentuk proses peningkatan mutu yang berkelanjutan, meskipun penguatan kompetensi teknologi, pengelolaan waktu, dan pendampingan evaluasi masih diperlukan.

## **1. Pendahuluan**

Mutu pendidikan merupakan elemen fundamental dalam penyelenggaraan pendidikan nasional karena berhubungan langsung dengan kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan. Pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), mutu pendidikan tidak hanya diukur dari capaian akademik peserta didik, tetapi juga dari proses pembelajaran, manajemen sekolah, serta budaya mutu yang berkembang di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, upaya peningkatan mutu pendidikan harus dilakukan secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan melalui suatu mekanisme penjaminan mutu yang terintegrasi di tingkat satuan pendidikan.

Hal ini diperkuat dengan Permendikbudristek Nomor 9 Tahun 2022, yang mengatur tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Peraturan ini merupakan bentuk tindak lanjut pemerintah dalam penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan dan sebagai landasan hukum bagi institusi pendidikan untuk memastikan evaluasi perbaikan penyelenggara pendidikan berjalan sesuai dengan standar, efektif dan merata bagi seluruh institusi pendidikan di Indonesia dan sebagai dasar perencanaan perbaikan mutu yang berkelanjutan. (Permendikbudristek, 2022)

Pendidikan yang berkualitas merupakan salah satu proses yang berlangsung melalui pembelajaran yang diadakan sesuai dengan kriteria tertentu 3 dan mampu memenuhi standar pendidikan, serta menghasilkan lulusan yang berkualitas dalam aspek akademik maupun non akademik, sehingga mampu bersaing di dunia kerja . untuk mencapai kualitas pendidikan yang di inginkan maka penting untuk menetapkan standar mutu yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan teknologi.

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada satuan pendidikan memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem pendidikan nasional. Regulasi pendidikan menegaskan bahwa setiap satuan pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan secara internal untuk menjamin terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan, pernyataan ini juga diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021, yang menekankan pentingnya pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Peraturan ini bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional melalui penetapan kriteria minimal sistem pendidikan yang berlaku secara nasional. Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, serta sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pendidikan.

Dalam mengatasi tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan, pemerintah mengambil langkah strategis yang sistematis agar dapat menjamin kualitas mutu pendidikan nasional dengan landasan kebijakan yang terstruktur. Salah satu langkah pemerintah dalam menjamin kualitas mutu pendidikan yaitu penetapan dan penguatan standar nasional pendidikan (SNP) yang mencakup standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana, standar penilaian pendidikan, standar pembiayaan dan standar pengelolaan. Delapan standar tersebut menjadi acuan bagi satuan pendidikan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pendidikan sehingga adanya evaluasi berkelanjutan dalam satuan pendidikan.

SMAN 4 Makassar merupakan salah satu sekolah yang telah menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagai salah satu upaya dalam melakukan evaluasi pendidikan secara mandiri. Berdasarkan hasil observasi awal di SMAN 4 Makassar, menunjukkan bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal berjalan dengan baik di buktikan bahwa kepala sekolah beserta tim penjaminan mutu berperan aktif dalam mengoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan dengan harapan agar sekolah dapat melaksanakan sistem penjaminan mutu internal secara optimal. Selain itu kepala sekolah melakukan pembinaan, pembimbingan, serta supervisi terhadap seluruh aktivitas pendidikan di SMAN 4 Makassar. Kegiatan tersebut sebagai unsur yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memperbaiki pengelolaan manajemen sekolah.

Kepala sekolah bersama tim penjaminan mutu juga melaksanakan penjaminan mutu dengan menyusun program pemetaan mutu yang terencana dengan membentuk tim pelaksana penjaminan mutu yang terbagi atas beberapa tim yaitu tim pengarah dan tim pengembang, dari tim ini terbagi atas beberapa tim yang bertanggung jawab memenuhi standar mutu sesuai dengan standar pendidikan nasional dengan tujuan untuk peningkatan mutu yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil pemetaan mutu tersebut, kepala sekolah juga secara berkelanjutan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan mutu yang sedang berjalan. Monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan delapan standar pendidikan untuk memastikan ketersediaan data pendukung terkait pengembangan yang harus dilakukan. Dengan demikian maka tahapan yang dilakukan kepala sekolah dalam memastikan mutu pendidikan yaitu meliputi koordinasi, pemetaan mutu, perencanaan kerja tim, serta pembentukan tim SPMI. Adapun dukungan yang diberikan oleh guru maupun tenaga kependidikan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal tergolong sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan penandatanganan nota kesepakatan (MoU) atau fakta integritas sebagai bentuk komitmen bersama agar seluruh warga sekolah terlibat aktif dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Meskipun kepala sekolah telah memberikan pengarahan, pengawasan serta evaluasi secara maksimal. Namun demikian ditemukan adanya beberapa kendala serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal, yaitu pertama, terkait koordinasi kepala sekolah dan tim penjaminan mutu internal yang belum optimal dan menyeluruh kepada warga sekolah, hal ini dibuktikan dari beberapa guru dan warga sekolah yang belum memahami terkait penerapan SPMI. Kedua, implementasi mutu yang belum dapat menjadi budaya bagi warga sekolah, ditandai dengan siswa yang masih berkeliaran pada mata pembelajaran serta guru yang terlambat dalam melakukan pembelajaran sehingga mampu menghambat kualitas pembelajar tersebut secara menyeluruh. Ketiga, keterbatasan waktu dan beban kerja guru yang menyebabkan kurangnya keterlibatan langsung guru dalam kegiatan penjaminan mutu, seperti dalam penyusunan dokumen dan evaluasi berkala terhadap kualitas mutu pendidikan secara mandiri.

Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa sistem penjaminan mutu internal memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan upaya dalam memastikan pertumbuhan aspek mutu standar mutu pendidikan, khususnya dalam memastikan keberlanjutan evaluasi pendidikan. Pemenuhan sistem nasional pendidikan merupakan kebutuhan dasar bagi seluruh

satuan pendidikan dalam memastikan kualitas pendidikan serta peranan kepala sekolah dalam menindaklanjuti program penerapan sistem penjaminan mutu internal dalam satuan Pendidikan. (Maulana & Suwadi, 2024)

Berdasarkan uraian fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 1) Mendeskripsikan penerapan sistem penjaminan mutu internal yang di laksanakan SMAN 4 Makassar. ;2) Identifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi sistem penjaminan mutu internal di SMAN 4 Makassar serta upaya untuk mengatasinya.

## **2. Tinjauan Pustaka**

### **1. Konsep Implementasi**

Secara umum Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.

Menurut Nurdin Usman dalam (Setyawati Heni & Winart Ika, 2024), implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan Mulyasa berpendapat dalam (Setyawati Heni & Winart Ika, 2024), implementasi juga merupakan proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan sehingga bisa memberikan dampak berupa perubahan pengetahuan, ketrampilan dan nilai sikap.

Dari beberapa pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Implementasi adalah langkah-langkah dalam mengaplikasikan kebijakan, program, atau rencana yang sudah disusun menjadi tindakan nyata di lapangan, bertujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Proses ini tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif atau teknis, tetapi juga mencakup pemahaman, penafsiran, dan komitmen para pelaksana terhadap kebijakan yang ada. Proses implementasi berlangsung dengan dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai hal, seperti kejelasan tujuan, peran serta interaksi antara aktor, ketersediaan sumber daya, dan kondisi sosial serta organisasi tempat kebijakan dilaksanakan. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada cara kebijakan tersebut diterapkan dan disesuaikan dengan konteks nyata di lapangan.

### **2. Penjaminan Mutu Pendidikan**

Penjaminan mutu (quality assurance) adalah upaya mengelola mutu yang dilakukan oleh pihak internal sekolah, agar dapat menjamin bahwa semua hal yang berkaitan dengan pelayanan pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga atau satuan pendidikan dapat mencapai standar mutu tertentu. Dengan kata lain, penjaminan mutu adalah proses menentukan dan memenuhi standar mutu. Pengelolaan yang dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan, sehingga konsumen, produsen, serta pihak-pihak yang berkepentingan dapat merasa puas.

Penjaminan mutu adalah sistem yang dibuat agar layanan pendidikan yang diberikan sesuai dengan standar kualitas yang telah ditentukan, dan terus diperbaiki seiring waktu. Tujuan utamanya adalah menciptakan keseimbangan antara apa yang ingin dicapai oleh institusi pendidikan, mutu pengajaran yang diberikan, hasil belajar mahasiswa, serta kebutuhan dunia kerja dan masyarakat.

Tujuan sistem penjaminan mutu yaitu menjamin pemenuhan standar pada satuan pendidikan secara sistematis, holistik, dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri. Sistem penjaminan mutu memiliki fungsi sebagai pengendali penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu.

### **3.Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)**

Secara umum penjaminan mutu pada satuan pendidikan merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan satuan pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Satuan pendidikan di harapkan maupun merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan mutu pendidikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Penerapan SPMI menekankan pentingnya komitmen dari para administrator sekolah, partisipasi semua pihak terkait, serta kepemimpinan yang kuat dalam mengelola proses penjaminan mutu internal. Dalam penerapannya, SPMI tidak hanya tentang memenuhi standar administratif, tetapi juga berfungsi sebagai alat strategis untuk meningkatkan kualitas sekolah dengan meningkatkan proses belajar mengajar, manajemen pendidikan, serta kompetensi guru dan staf pendukung pendidikan. Kemajuan SPMI biasanya dinilai melalui indikator output seperti memenuhi standar, indikator outcome seperti peningkatan hasil belajar siswa dan manajemen sekolah, serta indikator impact seperti tumbuhnya budaya kualitas dan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan(Habibi dkk., 2022)

Peningkatan kualitas pendidikan tidak bisa dilakukan dengan cara yang instan, tetapi memerlukan proses perencanaan yang teratur melalui pembuatan program untuk meningkatkan mutu. Dengan adanya program peningkatan mutu yang terencana dan berkelanjutan, sekolah dapat terus meningkatkan kualitas pendidikan secara sistematis. Pandangan ini sejalan dengan teori Deming dalam buku *Out Of The Crisis*, mengungkapkan terkait Total Quality Managemen(TQM) dalam bidang pendidikan menekankan bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan, perlu dilakukan perbaikan terus-menerus di semua aspek pendidikan. Ini mencakup kurikulum, pengajar, cara pengajaran, serta fasilitas dan infrastruktur.(Deming dkk., 2018)

Keberhasilan SPMI dapat dilihat dari tiga indikator. Pertama, indikator keluaran, meliputi kemampuan satuan pendidikan menjalankan seluruh siklus penjaminan mutu serta keberadaan organisasi penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan. Kedua, indikator hasil, yaitu apakah proses pembelajaran serta pengelolaan satuan pendidikan sudah berjalan sesuai standar. Ketiga, indikator dampak, di antaranya terbangunnya budaya mutu di satuan pendidikan serta adanya peningkatan mutu hasil belajar. Terdapat beberapa faktor penentu keberhasilan pelaksanaan SPMI, yaitu budaya organisasi, kepemimpinan kepala sekolah yang efektif, partisipasi pemangku kepentingan, komitmen dan konsistensi seluruh pemangku kepentingan, akuntabilitas, transparansi, dan integritas.

### **4.Siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal Sistem**

Penjaminan Mutu Internal berfungsi untuk memastikan bahwa semua komponen yang meliputi lembaga, kebijakan, dan tahapan yang berhubungan pada institusi pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan untuk menjamin terciptanya budaya mutu di lembaga pendidikan. Tujuannya untuk memperkuat kemampuan internal agar mampu mengidentifikasi, merencanakan, dan meningkatkan kualitas pendidikan secara mandiri dan berkesinambungan.(Kemendikdasmen, 2025)

### **3. Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan penelitian ini bertujuan untuk memahami dan memperoleh gambaran implementasi penerapan SPMI berdasarkan kondisi nyata di lapangan dengan mengumpulkan data secara sistematis, mengurutkannya sesuai dengan kategori, mendeskripsikan dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Dengan pendekatan kualitatif maka peneliti dapat memperoleh gambaran utuh dan komprehensif mengenai fenomena yang diteliti dari sudut pandang subjek penelitian.

(Creswell, 2014)mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu proses penelitian untuk memahami masalah sosial atau manusia, yang didasarkan pada pembangunan gambaran yang kompleks dan holistik, dianalisis dengan kata-kata, serta dilaporkan secara rinci

berdasarkan pandangan informan dalam setting alami. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menangkap kompleksitas realitas sosial yang tidak dapat diukur secara kuantitatif.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, di mana penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran, mendeskripsikan dan menjelaskan secara sistematis dan faktual mengenai fenomena yang diteliti terkait Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di SMAN 4 Makassar. Penelitian deskriptif digunakan untuk menyajikan gambaran mendalam mengenai kondisi, proses atau karakteristik objek penelitian berdasarkan data empiris yang ditemukan di lapangan sehingga mampu memberikan pemahaman yang jelas dan mendalam tentang objek penelitian.

Subjek penelitian ini adalah kepala sekolah, tim penjaminan mutu internal beserta satu guru yang ikut serta dalam implementasi program implementasi penjaminan mutu internal. Penelitian ini dilaksanakan pada 13 Juli 2026 hingga 18 Agustus 2026. Penentuan subjek dalam penelitian sebagai bentuk pandangan dari berbagai *stakeholder* dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal di SMAN 4 Makassar. Peneliti menyadari keterbatasan durasi ini sebagai salah satu keterbatasan penelitian yang perlu dipertimbangkan dalam menafsirkan hasil.

Pengumpulan data yang digunakan menggunakan tiga teknik yaitu, observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk menganalisis secara sistematis tentang berbagai hal yang berkaitan dengan keterampilan berbicara melalui pengamatan secara langsung dan aktivitas guru dan warga sekolah dalam implementasi SPMI. Wawancara digunakan untuk menggali data mengenai pengalaman langsung, pandangan serta peran dari subjek penelitian terkait peran kepemimpinan kepala sekolah serta kontribusi dari tim penjaminan mutu dan guru dalam sistem penjaminan mutu internal. Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan informasi sebagai bukti bahwa data dan informasi yang diperoleh adalah valid dan mencerminkan apa yang dituangkan dalam sebuah penelitian.

#### **4. Hasil dan Pembahasan**

Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara menyeluruh bagaimana program Sistem Penjaminan Mutu Internal dijalankan di SMAN 4 Makassar, dengan fokus pada proses pelaksanaannya di setiap satuan pendidikan. Penelitian ini tidak hanya meninjau cara program tersebut diaplikasikan dalam pembelajaran sehari-hari, tetapi juga melihat cara penyusunan, pengelolaan, serta keterlibatan berbagai pihak di lingkungan sekolah. Selain itu, penelitian ini juga mencoba mempelajari secara mendalam berbagai faktor yang mempercepat dan menghambat terwujudnya pelaksanaan SPMI, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang lengkap mengenai kondisi dan proses pelaksanaannya di lapangan.

Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal di SMAN 4 Makassar secara sistematis dan terorganisir. Pembahasan ini menjelaskan cara program diimplementasikan, tugas para pelaksana, serta cara Sistem Penjaminan Mutu Internal terpadu dalam kegiatan belajar mengajar. Selain itu, analisis tersebut juga fokus pada penemuan faktor-faktor yang bisa membantu atau menghalangi keberhasilan pelaksanaannya. Dengan demikian, pembahasan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana sistem penjaminan mutu internal diimplementasikan serta berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan program tersebut.

##### **1. Implementasi sistem penjaminan mutu internal**

Penjaminan mutu merupakan upaya yang dilakukan oleh lembaga pendidikan sebagai pelaksana dalam menghasilkan lulusan terbaik. Penjaminan mutu merupakan keseluruhan proses dalam penetapan dan pemenuhan standar mutu Pengelola yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, untuk dapat mencapai visi dan misi sebagai bentuk tanggung jawab dan pemenuhan janji kepada stakeholders. (Zahrok, 2020)

Secara umum, Sistem Penjaminan Mutu Internal diartikan sebagai cara terorganisir untuk terus memperbaiki kualitas pendidikan yang direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan diperbaiki oleh lembaga pendidikan itu sendiri, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan yang ada, agar bisa mencapai bahkan melebihi standar minimum yang telah ditentukan. Dokumen Akademik tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada tahun 2025 menekankan bahwa pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal didasarkan pada berbagai prinsip, termasuk filsafat, teori, sosiologi, hukum, dan pengalaman nyata. Kualitas pendidikan diartikan sebagai seberapa sukses proses pendidikan yang terorganisir dalam memaksimalkan semua bagian yang terlibat, termasuk input, proses, dan keadaan untuk mendapatkan hasil yang sesuai atau lebih baik dari harapan pemangku kepentingan.

Berdasarkan hasil penelitian, Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di SMAN 4 Makassar merupakan upaya perbaikan mutu yang dilaksanakan secara terstruktur melalui lima tahapan pelaksanaan di antaranya Penetapan standar mutu, Pemetaan mutu, Penyusunan Rencana Peningkatan Mutu, Pelaksanaan Peningkatan Mutu, Pemantauan dan evaluasi.

Dalam Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal, lima siklus yang menjadi tahapan pelaksanaan program merupakan komponen penting dalam memastikan keberhasilan program yang dilaksanakan. Terdapat lima komponen utama yang menjadi tahapan implementasi SPMI yaitu Penetapan standar mutu berkaitan dengan proses penetapan standar mutu yang akan diterapkan dengan berlandaskan pada standar nasional pendidikan. Pemetaan mutu berkaitan dengan hasil identifikasi evaluasi yang telah dilakukan dengan mengacu pada evaluasi diri sekolah, rapor siswa dan dokumen pendukung lainnya. Penyusunan Rencana Peningkatan Mutu merupakan langkah lanjutan yang menjadi perhatian pihak sekolah dalam melaksanakan program perbaikan, Pelaksanaan Peningkatan Mutu berkaitan dengan strategi hasil Penyusunan Rencana Peningkatan Mutu sehingga mampu meningkatkan mutu pendidikan yang dituangkan pada beberapa dokumen peningkatan mutu seperti RKS, RKSA dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan sekolah. Pemantauan dan evaluasi merupakan tahapan yang dilakukan saat program dilaksanakan dan telah terlaksana yang digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan program yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan edaran yang dikeluarkan oleh kemendikdasmen melalui portal PMP mengatakan bahwa Fokus SPMI adalah pada penguatan kapasitas internal untuk mengenali, merencanakan, dan meningkatkan mutu pendidikan secara mandiri dan berkelanjutan melalui siklus yang terdiri dari 5 langkah utama. Mengacu pada kebijakan tersebut kepala sekolah di SMAN 4 Makassar kemudian membentuk tim sistem penjaminan mutu internal dengan dikeluarkannya SK.421.3/136/UPTSMAN.04/Mks.I/DISDIK/VII/2025 dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal

#### **a. Penetapan standar mutu**

Penetapan standar mutu adalah langkah pertama dalam sistem penjaminan mutu. Standar mutu adalah sebagai gambaran mutu yang akan dicapai sekolah. Selain itu Stakeholder dalam pendidikan seperti orang tua, masyarakat, pemerintah, dan dunia industri memiliki persepsi yang berbeda tentang mutu. Perbedaan pandangan ini memengaruhi sekolah atau institusi. Pendidikan perlu menetapkan standar kualitas sebagai patokan dalam mewujudkan kualitas pendidikan yang baik. Oleh Karena itu, posisi standar mutu sangat penting dalam mewujudkan sekolah yang bermutu.

Dalam penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), yang menjadi pusat kekuatan adalah Kepala Sekolah sebagai pemimpin dan pihak-pihak yang terkait lainnya. Dalam menentukan standar mutu pada bidang pendidikan secara umum mengacu pada aspek input yang terdiri dari kepala sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, kurikulum, sarana dan prasarana. Standar proses mengacu pada aspek pelayanan, kerja sama dengan masyarakat dan lembaga serta mitra, budaya sekolah, konseling, serta hubungan dengan masyarakat. Standar

output berupa kompetensi lulusan yang mencakup berbagai pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang telah ditetapkan dalam standar inti dan kompetensi dalam setiap pembelajaran. Sinergi antar komponen mutu diharapkan dapat menciptakan budaya mutu yang saat ini menjadi kebutuhan dan tanggung jawab semua pihak. (Mardhiyah dkk., 2023)

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan standar mutu dalam implementasi sistem penjaminan mutu internal di SMAN 4 Makassar berjalan secara sistematis dan bertahap sesuai dengan siklus sistem penjaminan mutu internal. Dalam implementasi sistem penjaminan mutu internal di SMAN 4 Makassar dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan dengan tahapan awal pemetaan mutu dengan menggunakan Evaluasi Diri Sekolah (EDS). Evaluasi Diri Sekolah (EDS) digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas serta dijadikan acuan dalam membuat Rencana Kerja Tahunan (RKT). Melalui Evaluasi Diri Sekolah (EDS), sekolah dapat mengevaluasi kinerjanya dan mendorong pihak sekolah untuk terus melakukan perbaikan serta meningkatkan mutu. Kegiatan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) yang berbasis sekolah dengan melibatkan keterlibatan para pemangku kepentingan dari berbagai tingkatan, pendidik, serta tenaga kependidikan, agar tercapai transparansi dan validitas yang optimal.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sherwina Ranisa (2025) yang menekankan bahwa pada tahap penetapan standar mutu sekolah persiapan dokumen merupakan aspek penting dalam menetapkan standar mutu yang akan dilaksanakan seperti dokumen Standar Mutu Sekolah yang merujuk pada delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP), serta dokumen Manual SPMI yang memuat prosedur dalam lima tahapan siklus SPMI: Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan.

Dalam hal tersebut, upaya sekolah dalam menciptakan sekolah yang berkualitas, telah dilakukan dengan proses pemetaan standar mutu. Pihak sekolah melakukan beberapa hal, di antaranya adalah penetapan program dengan landasan Standar Nasional Pendidikan (SNP) Bersama seluruh warga sekolah, mengisi Evaluasi Diri Sekolah (EDS), menganalisis hasil pemantauan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah pada secara rutin yang dilaksanakan, dan didukung oleh dokumen lainnya seperti Rencana Kerja Sekolah yang disesuaikan oleh visi dan misi serta tujuan sekolah. Menurut Fransistya dalam (Sherwina Ranisa dkk., 2025) mengungkapkan bahwa gambaran mutu pendidikan saat ini, EDS juga menjadi dasar dalam menyusun dokumen strategis seperti visi, misi, RKS, RKJM, dan RKT. Selain itu menurut pendapat (Rahwati, 2019) bahwa Penetapan standar mutu pendidikan dimaksudkan untuk mengukur dan menilai pemenuhan standar pendidikan yang telah ditetapkan.

#### **b. Pemetaan mutu**

Pemetaan mutu merupakan proses yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk menganalisis capaian, mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan solusi awal dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Agustian Ramadana Putera dkk., (2022) memaparkan bahwa Pemetaan mutu menggunakan dokumen evaluasi diri yang memuat instrumen evaluasi diri dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai standar minimal dalam penyelenggaraan pendidikan. Hasil pemetaan mutu tersebut selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai pedoman untuk mengembangkan visi, misi, dan kebijakan sekolah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.

Dalam teori yang dibawa oleh W. Edward Deming persoalan mutu ada di problematika manajemen yang pada konteks ini mutu dihadapkan dengan lembaga pendidikan wajib melakukan pengukuran dari berbagai hal yang memiliki korelasi terhadap manajemen. Dalam teori deming, keputusan perbaikan atau pemetaan mutu tidak dapat dilakukan berdasarkan keputusan sendiri melainkan harus menggunakan data sehingga mampu memahami kondisi sistem dan variasi yang terjadi sehingga tindakan perbaikan dapat diarahkan pada penyebab masalah. Deming memandang organisasi sebagai sebuah sistem. Oleh karena itu, ketika terjadi masalah mutu yang harus dicari bukan hanya siapa yang melakukan kesalahan, tetapi bagaimana sistem dan proses menghasilkan kondisi tersebut

Sejalan dengan prinsip tersebut, Pemetaan mutu ini dilakukan melalui program evaluasi internal di sekolah/madrasah, yang dikenal sebagai Evaluasi Diri Sekolah (EDS) atau Evaluasi Diri Madrasah (EDM). Tahap-tahap yang ada pada proses evaluasi diri tersebut adalah: (a) Membuat instrumen evaluasi; (b) Menghimpun data evaluasi yang dibutuhkan; (c) Mengolah dan menganalisis data yang telah dihimpun; (d) Menyusun peta mutu; (e) Menggambarkan sejauh mana ketercapaian mutu berdasarkan kriteria SNP. (f) Mengidentifikasi masalah yang dihadapi dalam pencapaian mutu; dan (g) Menghasilkan solusi dan rekomendasi perbaikan untuk permasalahan yang telah diidentifikasi. (Maulana & Suwadi,2024)

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa pemetaan mutu di SMAN 4 Makassar berlangsung sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh lembaga pendidikan. Pada tahap pemetaan mutu, SMAN 4 Makassar melaksanakan pengumpulan data melalui Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dengan memanfaatkan berbagai sumber data, seperti rapor siswa, hasil evaluasi program, evaluasi dan supervisi guru, dokumen Kurikulum Satuan Pendidikan, serta bukti fisik pelaksanaan kegiatan. Proses analisis dilakukan oleh tim yang dibagi berdasarkan delapan Standar Nasional Pendidikan, sehingga setiap tim bertanggung jawab mengidentifikasi capaian dan kekurangan pada standar yang menjadi fokusnya sebelum dibawa ke forum rapat koordinasi untuk menentukan prioritas perbaikan.

Penelitian ini sesuai dengan ide perencanaan berbasis data yang diajukan oleh Herfiyanti, Setiyanti, dan Wulandari(2024) yang menekankan bahwa pemanfaatan data hasil evaluasi, termasuk data pada Rapor Pendidikan, memungkinkan sekolah mengidentifikasi akar masalah secara lebih tepat sebelum menyusun langkah perbaikan. Nurcahyati dan Haryati turut menegaskan bahwa perencanaan berbasis data melalui pendekatan identifikasi, refleksi, dan pembenahan (IRB) memberi peluang bagi sekolah untuk merumuskan prioritas program secara lebih terarah, meskipun implementasinya kerap menghadapi tantangan berupa keterbatasan pemahaman warga sekolah terhadap data yang tersedia. Pola pemetaan mutu di SMAN 4 Makassar pada dasarnya telah mengarah pada praktik tersebut, namun dokumentasi penelitian belum menunjukkan pemanfaatan platform Rapor Pendidikan secara eksplisit sebagai basis data utama, sehingga aspek ini dapat menjadi ruang penguatan pada siklus SPMI berikutnya

Sudarmin dkk.(2025) juga menekankan bahwa evaluasi diri yang efektif adalah hasil dari budaya organisasi yang bekerja sama dan terbuka, karena Keterlibatan aktif semua pihak di sekolah dalam proses evaluasi juga semakin meningkat. validitas dan kepercayaan terhadap kualitas data yang dihasilkan. Temuan bahwa setiap Tim di SMAN 4 Makassar memberikan hasil analisisnya secara jujur dalam rapat. koordinasi menunjukkan adanya usaha untuk membangun budaya yang terbuka tersebut. meskipun proses ini masih bisa ditingkatkan dengan memberikan pelatihan tentang literasi data kepada para guru agar Analisis capaian mutu tidak hanya menggambarkan situasi secara deskriptif, tetapi juga didasarkan pada indikator-indikator yang relevan.

Berdasarkan hasil penelitian yang disandingkan dengan teori dan penelitian terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa aspek proses pemetaan mutu dalam implementasi sistem penjaminan mutu internal di SMAN 4 Makassar telah menunjukkan Proses tersebut dilakukan melalui Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dengan memanfaatkan berbagai sumber data, antara lain rapor siswa, hasil evaluasi program, hasil evaluasi dan supervisi guru, dokumen Kurikulum Satuan Pendidikan, serta bukti fisik pelaksanaan kegiatan. Data tersebut kemudian dianalisis oleh tim berdasarkan delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) untuk mengidentifikasi capaian, kesenjangan, dan permasalahan mutu yang selanjutnya dibahas melalui rapat koordinasi untuk menentukan prioritas perbaikan. Temuan tersebut sejalan teori W. Edwards Deming menunjukkan kesesuaian dengan prinsip pengambilan keputusan berbasis data dan perbaikan berkelanjutan. melalui analisis data oleh masingmasing tim dan pembahasan hasil dalam rapat koordinasi dan masingmasing tim menyampaikan hasil analisis secara terbuka dan jujur dalam forum koordinasi, sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang menegaskan pemanfaatan data evaluasi untuk mengidentifikasi akar masalah sebelum menentukan langkah perbaikan dan pentingnya keterbukaan dan kerja sama dalam evaluasi diri.

### **c. Penyusunan Rencana Peningkatan Mutu**

Dalam kebijakan kemendikdasmen (2025) dijelaskan bahwa Berdasarkan hasil pemetaan mutu, satuan pendidikan dan pemerintah daerah membuat rencana tindakan strategis untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan. Oleh karena itu, pada tahap ini satuan pendidikan membuat rencana dan strategi untuk memenuhi standar berdasarkan hasil pemetaan mutu, serta menentukan kegiatan-kegiatan yang ditulis dalam dokumen perencanaan sekolah atau daerah. Perencanaan ini penting agar peningkatan kualitas dilakukan secara teratur, tidak acak, dan didasarkan pada data yang terkumpul.

Dalam teori yang dibawa oleh W. Edward Deming, perbaikan mutu dimulai dari tahap Plan, yaitu mengidentifikasi masalah, memahami kondisi yang ada, menentukan tujuan yang hendak dicapai, serta menyusun tindakan perbaikan berdasarkan informasi dan data yang tersedia. Dalam konteks SPMI, prinsip tersebut tercermin pada tahap perbaikan mutu dimulai dari tahap Plan, yaitu mengidentifikasi masalah, memahami kondisi yang ada, menentukan tujuan yang hendak dicapai, serta menyusun tindakan perbaikan berdasarkan informasi dan data yang tersedia. Dalam konteks SPMI, prinsip tersebut tercermin pada tahap penyusunan rencana peningkatan mutu, yaitu ketika sekolah menggunakan hasil pemetaan mutu untuk menentukan prioritas permasalahan, merumuskan program, menentukan pihak yang bertanggung jawab, serta menetapkan langkah yang diperlukan untuk mencapai standar mutu., yaitu ketika sekolah menggunakan hasil pemetaan mutu untuk menentukan prioritas permasalahan, merumuskan program, menentukan pihak yang bertanggung jawab, serta menetapkan langkah yang diperlukan untuk mencapai standar mutu.

Sejalan dengan ini penyusunan rencana pemenuhan mutu di satuan pendidikan dilakukan dalam bentuk rencana kerja sekolah, baik rencana kerja jangka menengah maupun tahunan. Sekolah sebagai sebuah lembaga atau institusi memiliki satu tujuan atau beberapa tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan adanya rencana, tujuan, serta cara-cara yang akan digunakan untuk mencapai tujuan itu. Secara umum, tujuan sekolah terlihat dari visi dan misi yang ada di sekolah itu. Untuk mewujudkan visi dan misi sekolah, termasuk meningkatkan kualitas guru, setiap sekolah harus membuat rencana program sekolah dan kegiatan sekolah yang dicantumkan dalam Rencana Pengembangan Sekolah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahap penyusunan mutu di SMAN 4 Makassar diwujudkan melalui penentuan program peningkatan mutu berdasarkan skala prioritas pada delapan Standar Nasional Pendidikan, yang kemudian diselaraskan dengan visi, misi, dan tujuan sekolah melalui forum rapat koordinasi yang melibatkan tim SPMI, guru, komite sekolah, siswa, dan pengawas sekolah. Penentuan prioritas program didasarkan pada tingkat urgensi kebutuhan sekolah, seperti peningkatan hasil belajar siswa dan penguatan sarana pembelajaran.

Dari aspek sumber daya, SMAN 4 Makassar telah memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia untuk mendukung pembelajaran dan pelaksanaan program mutu. Penggunaan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, smart TV, dan fasilitas pembelajaran berbasis teknologi menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap pelaksanaan program. Namun, penelitian juga menemukan adanya keterbatasan kesiapan sumberdaya manusia dan waktu guru karena harus membagi waktu antara kegiatan pembelajaran dan program sekolah.

Hal ini sejalan dengan penemuan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Maulana & Suwadi, 2024) mengemukakan bahwa dalam menetapkan rencana peningkatan kualitas pendidikan, hal utama yang perlu diterapkan yakni penggunaan peta mutu yang telah dibuat sebelumnya sebagai indikator utama. Selain itu, perlu didukung oleh dokumen lain seperti regulasi yang berlaku mengenai standar kurikulum, pengelolaan satuan pendidikan, pengelolaan sumber daya manusia, serta peningkatan kualitas pembelajaran melalui berbagai inovasi terbaru.

Menyusun rencana pelaksanaan program secara lebih operasional, diawali dengan analisis instrumen dan data mutu, termasuk data hasil belajar peserta didik, dilanjutkan dengan pembentukan tim, sosialisasi, dan rapat koordinasi untuk menentukan program yang akan dilaksanakan. Keterlibatan warga sekolah diwujudkan melalui pelatihan dan workshop

peningkatan kompetensi guru, sementara pengelolaan sumber daya ditunjukkan melalui optimalisasi sarana dan prasarana, seperti revitalisasi ruang kelas, laboratorium, dan penyediaan fasilitas digital berupa smart TV, meskipun keterbatasan waktu guru masih menjadi kendala yang perlu terus dikelola.

Temuan mengenai keterbatasan waktu dan kesiapan sumber daya manusia ini konsisten dengan hasil penelitian Khikmah (2020) tentang manajemen sarana dan prasarana pendidikan, yang mengidentifikasi bahwa faktor penghambat utama dalam pengelolaan sumber daya pendidikan umumnya bersumber dari keterbatasan komitmen waktu sumber daya manusia, di samping faktor pendanaan, sementara faktor pendukungnya justru terletak pada keterlibatan aktif pengawas dan kerja sama antarpihak. Pola ini menegaskan bahwa kendala waktu bukanlah persoalan yang unik dialami SMAN 4 Makassar, melainkan tantangan struktural yang lazim dijumpai pada implementasi manajemen mutu di satuan pendidikan lain.

Terdapat perbandingan dengan penelitian (Muhammad Aris, 2019) mengenai implementasi SPMI turut memperkaya pembahasan pada tahap ini. Penelitian tersebut menemukan bahwa pelaksanaan program peningkatan mutu di sekolah yang diteliti berjalan mengikutisiklus SPMI, tetapi menghadapi kendala berupa anggaran, rangkap jabatan, koordinasi, tidak adanya pendampingan secara teratur dalam implementasi SPMI dan kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Kondisi ini berbeda dengan temuan pada SMAN 4 Makassar, yang justru menunjukkan tingkat keterlibatan warga sekolah yang relatif tinggi, sebagaimana tampak dari kesediaan guru mengikuti pelatihan dan mengambil tanggung jawab tim meski di tengah keterbatasan waktu serta dukungan dari pemerintah dalam perbaikan sarana dan prasarana dalam mendukung peningkatan mutu. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan pelaksanaan rencana peningkatan mutu tidak hanya ditentukan oleh satu faktor, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran kolektif dan budaya kerja sama yang telah terbangun di lingkungan sekolah dan ketersediaan sarana dan prasarana.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Herfiyanti dkk. (2024) menunjukkan bahwa penggunaan data pendidikan bisa membantu sekolah dalam menentukan prioritas program secara lebih tepat sasaran. Kelebihan utama dari tahap ini adalah adanya kaitan antara hasil pemetaan dengan program-program prioritas. Artinya, sekolah tidak langsung menjalankan program tersebut sebelum memahami kondisi yang perlu diperbaiki.

Berdasarkan hasil penelitian yang dibandingkan dengan teori dan penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa aspek rencana peningkatan mutu dalam penerapan sistem penjaminan mutu internal di SMAN 4 Makassar telah berjalan secara sistematis dan didasarkan pada pemetaan mutu yang telah dilakukan. Proses ini sejalan dengan teori W. Edwards Deming dalam tahap Plan menekankan perencanaan yang didasarkan pada data, menetapkan prioritas, serta mendorong perbaikan yang terus-menerus. Temuan ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya yang menekankan betapa pentingnya menggunakan data dalam merancang program peningkatan kualitas. Namun, kendala seperti waktu yang terbatas dan kesiapan sumber daya manusia masih perlu diperbaiki agar perencanaan mutu dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

#### **d. Pelaksanaan Peningkatan Mutu Pelaksanaan**

Peningkatan Mutu diawali dengan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah agar memahami peran dan tanggung jawabnya dalam mendukung program mutu. Selanjutnya dilakukan pembagian tugas dan alokasi sumber daya secara jelas, baik berupa dana, fasilitas, maupun tenaga pendidik. Pelaksanaan program berjalan sesuai jadwal dan diawasi oleh koordinator tim SPMI agar tetap mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan. (Sherwina Ranisa dkk., 2025)

Dalam teori yang dibawa oleh W. Edward Deming, proses pelaksanaan peningkatan mutu dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan teori W. Edwards Deming dapat dilihat pada tahap Do dalam siklus Plan-Do-Check-Act (PDCA). Tahap ini adalah proses menerapkan rencana peningkatan mutu yang sudah dibuat berdasarkan hasil pemetaan dan kebutuhan sekolah yang paling utama. Pendidikan yang baik sangat penting untuk membentuk sumber

daya manusia yang mampu bersaing dan menjadi yang terbaik dalam era globalisasi yang sangat kompetitif ini. Berkaitan dengan tekanan tersebut, lembaga pendidikan mulai memperbaiki diri dengan menerapkan sistem manajemen kualitas yang digunakan perusahaan. Mereka berpikir bahwa perusahaan dan Lembaga pendidikan memiliki input dan output yang sama, hanya berbeda dalam bentuknya.

Hal tersebut sejalan dengan teori Deming yang menekankan bahwa rencana mutu harus diterapkan secara konsisten dengan melibatkan seluruh anggota organisasi dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Pelaksanaan program di SMAN 4 Makassar yang melibatkan kepala sekolah, Tim SPMI, guru, dan warga sekolah menunjukkan bahwa peningkatan mutu tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi merupakan tanggung jawab Bersama.

Sejalan dengan temuan tersebut, kajian dalam literatur (Mardhiyah dkk., 2023) menjelaskan bahwa Setelah melalui siklus perencanaan, maka tahap berikutnya adalah implementasi. Pada siklus ini, yang merupakan bagian dari implementasi mutu pendidikan, merupakan tahapan yang sangat penting dalam mencapai sekolah yang memiliki mutu baik. Meski dalam siklus SPMI dianggap sebagai siklus yang terdiri dari empat tahap, namun siklus ini menjadi penggerak utama semua konsep dan rencana yang telah dibuat pada siklus sebelumnya. Sekolah yang sudah memiliki Sistem Penjaminan Mutu Internal, maka dalam menerapkannya dilakukan sendiri secara mandiri. SPMI adalah sistem penjaminan mutu yang dijalankan secara mandiri oleh lembaga pendidikan bersama seluruh pihak yang terlibat. Prinsip mandiri berarti semua sistem dan kegiatan terkait dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dimonitor, dan dievaluasi oleh lembaga pendidikan itu sendiri.

Kemudian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program dilakukan melalui pembagian tugas, sosialisasi, rapat koordinasi, serta pelibatan kepala sekolah, tim SPMI, guru, dan pihak terkait lainnya. Data hasil pemetaan menjadi dasar dalam menentukan pelaksanaan program sesuai kebutuhan sekolah dan peserta didik. Keterlibatan warga sekolah pada tahap ini tergolong baik. Kepala sekolah memberikan arahan dan pelatihan bagi guru, sedangkan koordinator dan guru terlibat dalam pelaksanaan program melalui tim kerja masing-masing. Hasil observasi dan dokumentasi menunjukkan adanya partisipasi warga sekolah dalam pelaksanaan program serta kegiatan pelatihan dan workshop.

Pada aspek sumber daya, sekolah telah memanfaatkan sarana dan prasarana untuk mendukung pembelajaran. Pemanfaatan ruang kelas, laboratorium, smart TV, dan fasilitas pembelajaran berbasis digital menjadi bagian dari dukungan terhadap peningkatan mutu. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa revitalisasi ruang dan pengadaan fasilitas dari pemerintah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program.

Temuan ini juga memperkuat dari hasil penelitian Irnawati dkk. (Irnawati dkk., 2025) di MAN 2 Rembang yang menunjukkan bahwa keberhasilan SPMI dipengaruhi oleh keterlibatan kepala sekolah, guru, peserta didik, komite, dan orang tua dalam siklus perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan tindak lanjut. Penelitian Maulana dan Suwadi (2024) juga menegaskan bahwa SPMI harus terintegrasi dengan pelaksanaan pengelolaan pendidikan, bukan berhenti pada dokumen perencanaan.

Sejalan dengan hal tersebut, Penelitian yang dilakukan oleh Piranggada dkk.(2025) menegaskan bahwa untuk mempertahankan kualitas budaya sekolah menengah secara berkelanjutan, diperlukan kepemimpinan kepala sekolah yang konsisten, kerja sama antar guru, serta penerapan SPMI yang diintegrasikan dengan penggunaan data dan proses perbaikan yang terus menerus. Temuan tersebut sesuai dengan SMAN 4 Makassar karena kepala sekolah sudah berperan mengkoordinasikan dan para guru terlibat dalam tim pelaksana.

Berdasarkan hasil penelitian yang disandingkan dengan teori dan penelitian terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa aspek proses penyusunan peningkatan mutu dalam implementasi sistem penjaminan mutu internal di SMAN 4 Makassar telah menunjukkan perubahan dari rencana menuju Tindakan sejalan dengan teori W. Edward Deming bahwa keberhasilan jangka panjang sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan. Program mutu

tidak cukup hanya terlaksana, tetapi perlu memastikan adanya perubahan pada praktik pembelajaran, pengelolaan sekolah, dan perilaku warga sekolah. Dengan demikian, pelaksanaan harus selalu diikuti dengan pengukuran hasil sehingga sekolah dapat mengetahui apakah program benar-benar menghasilkan perbaikan serta keterlibatan seluruh warga sekolah dalam pelaksanaan program, hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menegaskan keberhasilan SPMI dipengaruhi oleh keterlibatan kepala sekolah, guru, peserta didik, komite, dan orang tua dalam siklus perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan tindak lanjut.

#### **e. Pemantauan dan evaluasi**

Dalam penjaminan mutu internal, tahap evaluasi merupakan tahap dimana kepala sekolah sebagai auditor melakukan kegiatan pengawasan dan penilaian secara objektif atas efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program dan penggunaan sumber daya. Tahap evaluasi sebagai tolak ukur dan penilaian terhadap ketercapaian standar mutu 8 SNP. Selain itu, dengan evaluasi dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan dan permasalahan yang terjadi di sekolah.

Dalam teori yang dibawa oleh W. Edward Deming, Dalam konteks SPMI, pemantauan adalah bagian dari tahap Check, yaitu proses mengamati dan mengukur apakah program peningkatan mutu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan standar yang ditentukan. Pengendalian mutu harus dilakukan berdasarkan hasil pengukuran dan informasi yang benar-benar ada. Pemeriksaan bukan hanya untuk mencari kesalahan yang terjadi selama pelaksanaan, tetapi juga untuk mengetahui apakah proses yang dilakukan berhasil mencapai hasil sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Evaluasi hasil pencapaian standar mutu juga merupakan bagian dari penerapan tahap Check. Penelitian menunjukkan bahwa evaluasi dilakukan dengan mengadakan rapat koordinasi serta menggunakan instrumen evaluasi yang disusun oleh masing-masing tim, berdasarkan delapan standar yang telah ditetapkan. Evaluasi digunakan untuk mengetahui program yang sudah selesai, program yang belum selesai, serta masalah-masalah yang terjadi selama pelaksanaannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di SMAN 4 Makassar, pemantauan dan evaluasi dilakukan secara rutin dengan cara mengawasi langsung proses belajar mengajar dan kegiatan sekolah, menggunakan alat pemantau berdasarkan delapan standar mutu, serta mengumpulkan bukti fisik berupa dokumen-dokumen terkait. Evaluasi pencapaian standar mutu dilakukan dengan mengadakan rapat koordinasi yang dihadiri oleh kepala sekolah, koordinator SPMI, dan para guru. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya ditindak lanjuti dengan membuat rekomendasi untuk perbaikan dan revisi terhadap program yang ada.

Sejalan dengan hal tersebut, penelitian yang dilakukan (Istikomah dkk., 2022) menjelaskan bahwa monitoring dan evaluasi adalah dua hal yang berbeda, tetapi saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Monitoring adalah proses untuk memahami dan mengevaluasi apakah program yang telah direncanakan berjalan dengan lancar, serta menemukan hambatan jika masih ada. Jadi, monitoring lebih fokus pada mengawasi jalannya proses pelaksanaan. Evaluasi tersebut fokus pada upaya pengendalian dan penegakan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Tujuan dilakukan pemantauan ini adalah agar dapat memperoleh masukan mengenai kebutuhan terhadap program yang telah diusulkan, baik yang berkaitan dengan biaya, waktu maupun pelaksanaannya. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana program itu berhasil, melihat hasil yang dicapai, dan mendapatkan saran atau masukan dari pemangku kepentingan.

Lebih lanjut, dalam penelitian yang dilakukan (Habibi dkk., 2022) menunjukkan bahwa agar kualitas lembaga pendidikan tetap baik, diperlukan perhatian yang serius dari pihak administrasi pendidikan, pemerintah, serta masyarakat. Karena dalam sistem pendidikan nasional saat ini, fokus pada kualitas tidak hanya menjadi tugas sekolah dan pemerintah, tetapi juga melibatkan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat perlu menyadari pentingnya dan fokus meningkatkan kualitas pendidikan.

Hal serupa juga disampaikan oleh Rohman (2023) dalam (Ramli, 2025) terkait Evaluasi diri yang teratur dan terjadwal membantu sekolah mengenali masalah dengan tepat dan terorganisir. Dengan adanya evaluasi yang dilakukan secara rutin, sekolah dapat mengawasi perubahan

dalam kemampuan dan kualitas pelayanan pendidikan, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Setiap hasil evaluasi yang ditemukan bisa menjadi acuan untuk membuat rencana perbaikan yang terus-menerus, sehingga kualitas pendidikan yang diberikan kepada siswa bisa terus berkembang seiring berjalannya waktu. Perbaikan ini juga mencakup pengisian standar pendidikan yang berlaku, yang akan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman.

Berdasarkan hasil penelitian yang disandingkan dengan teori terkait aspek pemantauan dan evaluasi dalam sistem penjaminan mutu internal maka dapat disimpulkan bahwa pemantauan dan evaluasi SPMI di SMAN 4 Makassar telah dilaksanakan melalui monitoring secara langsung, penggunaan instrumen monitoring, rapat evaluasi, pemeriksaan dokumen, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program. Kepala sekolah melakukan monitoring secara langsung terhadap proses pembelajaran dan kegiatan sekolah, sedangkan Tim SPMI menggunakan instrumen dan bukti fisik sebagai dasar untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program. Evaluasi ketercapaian standar mutu dilakukan melalui rapat koordinasi dengan seluruh warga sekolah untuk mengetahui program yang telah tercapai, program yang belum tercapai, serta kendala yang ditemukan selama pelaksanaan. Hal ini sejalan dengan teori W. Edward Deming bahwa Standarisasi dari berbagai perlakuan bermutu sangat dibutuhkan untuk proses evaluasi kerja sama tim agar dapat dijalankan oleh semua stakeholder yang ada di sekolah.

## **2. Faktor pendukung dan faktor penghambat SPMI di SMAN 4 Makassar**

Dalam pelaksanaan sebuah program tentu ada beberapa hal yang menjadi faktor pendukung keberhasilan program dan faktor penghambat keberhasilan program, hal ini merupakan salah satu aspek yang menjadi penilaian dalam mengukur keberhasilan dan perbaikan yang harus dilakukan. Dalam pelaksanaannya diperlukan kontribusi dan komunikasi yang baik antar seluruh pihak sehingga kesalahan yang muncul dapat diperbaiki dengan baik. Hal ini sejalan dengan teori W. Edward Deming bahwa mutu merupakan tanggung jawab bersama dan memerlukan kerja sama seluruh unsur organisasi. Deming menekankan bahwa peningkatan mutu tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, tetapi harus melibatkan seluruh anggota organisasi melalui koordinasi dan komunikasi yang efektif. Keterkaitan tersebut terlihat pada hasil penelitian di SMAN 4 Makassar yang menunjukkan bahwa kepala sekolah, Tim SPMI, guru, tenaga kependidikan, komite sekolah, pengawas, dan warga sekolah lainnya terlibat dalam pelaksanaan program mutu melalui rapat koordinasi, sosialisasi, pelatihan, serta pembagian tugas. Kerja sama tersebut memungkinkan setiap pihak memberikan kontribusi sesuai dengan perannya dalam setiap tahapan SPMI.

Namun demikian, dalam penelitian ini masih terdapat beberapa kendala teknis yang terjadi dilapangan. Hal ini terkait keterbatasan waktu guru dalam pelaksanaan program dan variasi tingkat pemahaman warga sekolah terhadap teknologi sehingga dinilai mampu menghambat proses peningkatan mutu. Kondisi tersebut menunjukkan meskipun adanya komitmen yang baik, upaya penguatan teknologi dan pengaturan waktu yang baik sangat diperlukan dalam implementasi peningkatan mutu secara menyeluruh.

### **a. Faktor pendukung**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berhasilnya menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di SMAN 4 Makassar didukung oleh tiga faktor utama, yaitu (1). komitmen dan kerja sama dari semua warga sekolah, (2) kepemimpinan yang baik dari kepala sekolah, dan (3) dukungan sarana, prasarana, serta pemanfaatan teknologi. Data wawancara menegaskan bahwa rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh kepala sekolah, koordinator SPMI, dan guru menjadi faktor utama sehingga setiap program mutu dapat berjalan sesuai siklus yang ditentukan, mulai dari. dari penetapan standar hingga tindak lanjut evaluasi. Kerja sama tim tidak hanya terjadi di dalam tim itu sendiri. sekolah, serta melibatkan tokoh masyarakat dan komite sekolah yang turut membantu dan berkontribusi. dalam bentuk dukungan moral maupun berpartisipasi dalam rapat koordinasi mutu.

Selanjutnya, dalam mendukung keberhasilan program yang dilaksanakan dukungan sarana dan prasarana juga sangat mendukung pelaksanaan peningkatan mutu terlihat dari revitalisasi ruang laboratorium, ruang tata usaha, perpustakaan, serta beberapa ruang kelas, di samping pemanfaatan teknologi pembelajaran berupa smart TV. Ketersediaan fasilitas ini memperkuat pelaksanaan siklus SPMI karena menyediakan lingkungan belajar yang lebih memadai sekaligus mendukung proses pemetaan dan peningkatan mutu berbasis data.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam penelitian (Kamaruddin dkk., 2021) menegaskan bahwa peran kepemimpinan kepala sekolah sebagai leader dan manajer merupakan unsur yang sangat menentukan keberhasilan manajemen mutu. Temuan tersebut memperkuat hasil penelitian ini, karena kepala sekolah di SMAN 4 Makassar juga tampak berperan aktif dalam mengoordinasikan, membina, membimbing, serta melakukan supervisi terhadap pelaksanaan SPMI, sehingga kepemimpinan yang konsisten dapat dipandang sebagai faktor pendukung yang bersifat lintas konteks.

Hal yang sama di sampaikan oleh Piranggada dkk. (2025) dalam penelitiannya yang mengatakan bahwa tentang sustainable quality culture di sekolah menengah, yang menemukan bahwa keberlanjutan budaya mutu memerlukan kepemimpinan kepala sekolah yang konsisten, kerja sama antarguru, serta integrasi SPMI dengan pemanfaatan data dan perbaikan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil analisis yang disandingkan dengan penelitian terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung implementasi sistem penjaminan mutu internal di SMAN 4 Makassar terletak pada keterlibatan seluruh warga sekolah, ketersediaan sarana dan prasarana yang cukup baik, struktur organisasi yang jelas, pengawasan rutin serta evaluasi berkelanjutan sehingga hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menegaskan bahwa keberlanjutan budaya mutu memerlukan kepemimpinan kepala sekolah yang konsisten, kerja sama antarguru.

#### **b. Faktor penghambat**

Meskipun umumnya berjalan lancar, penerapan SPMI di SMAN 4 Makassar masih menghadapi beberapa masalah. Tiga faktor utama yang menghambat, berdasarkan hasil wawancara, pengamatan, dan dokumentasi, adalah (1) kurangnya kemampuan guru dalam menguasai teknologi, (2) terbatasnya waktu yang dimiliki guru, dan (3) kurangnya keterlibatan sebagian warga sekolah, terutama tenaga nonakademik seperti tim kebersihan dan petugas keamanan. Kepala sekolah menyebutkan bahwa tingkat pemahaman para guru tentang teknologi berbeda-beda, sehingga ada beberapa guru yang masih membutuhkan pelatihan tambahan. Sementara itu, koordinator SPMI menunjukkan bahwa waktu dan tenaga manusia yang terbatas menjadi hambatan yang sering muncul dalam pelaksanaan program tersebut.

Beban kerja guru yang sangat besar juga mempengaruhi kemampuan maksimal dalam berkontribusi pada setiap hal. Tahapan siklus SPMI dimulai dari membuat dokumen terlebih dahulu, kemudian melanjutkan ke pelaksanaan, pengawasan, evaluasi berkala, serta peningkatan berkelanjutan. Kondisi ini menegaskan bahwa hambatan yang dihadapi bersifat teknis-operasional dan sangat berkaitan dengan kapasitas sumber daya manusia, bukan pada aspek komitmen atau motivasi warga sekolah

Sejalan dengan kendala yang dialami oleh SMAN 4 Makassar, Habibi dkk. (2022) menekankan bahwa keberlangsungan mutu lembaga pendidikan menuntut perhatian serius dari administrator pendidikan, pemerintah, dan masyarakat secara bersama-sama, sehingga hambatan yang bersumber dari keterbatasan kapasitas internal sekolah idealnya diimbangi dengan dukungan eksternal, misalnya dalam bentuk pelatihan teknologi bagi guru maupun penguatan sumber daya manusia pendukung. Hal ini memperkuat rekomendasi bahwa kendala waktu dan literasi teknologi di SMAN 4 Makassar dapat diatasi melalui program peningkatan kompetensi yang berkelanjutan, bukan semata-mata melalui evaluasi internal.

Namun hambatan yang ditemukan tidak menunjukkan kegagalan implementasi SPMI, tetapi menunjukkan bahwa SPMI masih berada dalam proses penguatan kelembagaan. Oleh sebab itu, strategi penyelesaiannya perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas SDM,

penguatan literasi digital dan data, penataan waktu kerja, serta perluasan partisipasi seluruh warga sekolah.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sugiarti, 2023) menegaskan bahwa Peningkatan mutu pendidikan di sekolah, tidak akan berjalan maksimal tanpa dukungan dari berbagai pihak. Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan sekolah dalam meningkatkan mutu Pendidikan. Dalam penelitiannya, peneliti menegaskan bahwa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal meliputi sikap kepepmimpinan yang dimiliki oleh kepala sekolah harus mampu mengkoordinir seluruh warga sekolah, agar sekolah mempunyai tujuan yang sama dan satu arah., pengelolaan SDM yang dimiliki sekolah, dan penyediaan sarana dan prasaran pendukung Pendidikan.

Berdasarkan hasil analisis yang disandingkan dengan penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat utama dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di SMAN 4 Makassar yakni keterbatasan waktu yang dimiliki guru dan ketidakmampuan dalam penggunaan teknologi bagi sebagian guru sehingga hal ini menunjukkan masih diperlukan penguatan dalam pengelolaan waktu yang baik serta penggunaan teknologi secara menyeluruh bagi seluruh pihak dalam satuan pendidikan sehingga mampu meningkatkan mutu pendidikan secara menyeluruh.

## **5. Simpulan dan Saran**

### **Simpulan**

Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di SMAN 4 Makassar berjalan secara sistematis dan terstruktur sesuai dengan kebijakan kementerian pendidikan dasar dan menengah dibuktikan pada tahapan pelaksanaan dilakukan berdasarkan siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal yaitu: Penetapan standar mutu, Pemetaan mutu, Penyusunan rencana peningkatan mutu, pelaksanaan peningkatan mutu, Pemantauan dan evaluasi. Proses peningkatan mutu juga di dukung oleh sarana dan prasarana salah satunya revitalisasi ruang kelas, laboratorium dan ruang tata usaha serta pengadaan Smart TV guna menunjang pembelajaran berbasis teknologi. Secara umum, implementasi SPMI telah berjalan berdasarkan kebijakan dan tujuan sekolah meskipun dalam penerapannya masih terdapat kendala teknis yang masih harus terus di perbaiki. Faktor pendukung meliputi komitmen yang dijalankan oleh setiap warga sekolah, koordinasi yang terarah oleh kepala sekolah dan koordinator tim kepada seluruh warga sekolah, serta ketersediaan sarana dan prasarana dalam menunjang perbaikan dan peningkatan mutu. Sementara itu, faktor penghambat dalam penerapan SPMI meliputi keterbatasan waktu yang dimiliki guru dalam implementasi SPMI serta keterbatasan sebagian guru dalam penggunaan teknologi sehingga dirasa mampu menghambat peningkatan mutu secara maksimal. Secara keseluruhan, hambatan yang dimiliki secara keseluruhan tidak menghambat penerapan program, namun hal ini tetap perlu diperbaiki dengan baik

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang ingin disampaikan dalam memaksimalkan penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal yaitu bagi pemerintah agar terus memperkuat dukungan serta pendampingan bagi lembaga pendidikan dalam melaksanakan evaluasi secara mandiri, bagi pihak sekolah yang melaksanakan program di harapkan mampu melakukan perbaikan secara terus menerus terhadap kendala yang dihadapi serta meningkatkan komitmen bagi pihak sekolah dalam membangun budaya mutu yang berkualitas dengan terus memperkaya dan memperkuat kompetensi guru dan tenaga kependidikan dalam bidangnya masing-masing.

### **Daftar Pustaka**

- Agustian Ramadana Putera, Ervina Sri Kusuma Wardani, Syahrial Shaddiq, Jarkawi, Ita Nurcholifah, Fachrurazi, Ida Rosyida, & Berlian Nursyanti. (2022). *Penjaminan Mutu Pendidikan*.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications. [https://books.google.co.id/books?id=4uB76lC\\_pOQC](https://books.google.co.id/books?id=4uB76lC_pOQC)

- Deming, W. E., Cahill, K. E., & Allan, K. L. (2018). *Out of the Crisis, reissue*. MIT Press. <https://books.google.co.id/books?id=RTNwDwAAQBAJ>
- Habibi, H., Arismunandar, A., Rahman, A., & Darmawangsa, A. (2022). Internal Quality Assurance Management as a Strategy for Achieving National Education Standards through The Principle of Continuous Improvement. *AL-TANZIM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 6(1), 531–543. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v6i2.3512>
- Herfiyanti, N., Setiyanti, W., & Wulandari, A. (2024). Peningkatan Mutu Sekolah Dengan Perencanaan Berbasis Data Rapor Pendidikan. *LEARNING: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 4(3), 508–512. <https://doi.org/10.51878/learning.v4i3.3149>
- Irnowati, D., Haryati, T., & Wuryandini, E. (2025). Implementasi SPMI dalam Meningkatkan Mutu Sekolah di MAN 2 Rembang. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(1), 449–457. <https://doi.org/10.37481/jmh.v5i1.1247>
- Istikomah, Dzulfikar Akbar Romadlon, & Achmad Bagus Hendy Kurniawan. (2022). *Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di Sekolah Dasar*. <https://doi.org/https://doi.org/10.21070/pssh.v3i.200>
- Kamaruddin, K., Yahya, Muh., Mulyadi, A., & Basso, S. B. (2021). Peran Kepala Sekolah Dan Tim Penjamin Mutu Sekolah Dalam Menerapkan Manajemen Mutu Di Sdn 1 Lejang Kabupaten Pangkep. *Guru Membangun*, 40(2), 74. <https://doi.org/10.26418/gm.v40i2.49199>
- Kemendikdasmen. (2025). <https://pmp.kemendikdasmen.go.id/implementasi/spmi>
- Mardhiyah, M., Saputra, A., Fahrezi, D. W., Hasri, S., & Sohiron, S. (2023). Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di Sekolah dasar. *Sustainable Jurnal Kajian Mutu Pendidikan*, 6(2), 698–705. <https://doi.org/10.32923/kjmp.v6i2.4036>
- Maulana, M. M., & Suwadi, S. (2024). Integrasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Dalam Meningkatkan Standar Mutu Pengelolaan Pendidikan Di Sekolah. *Idaarah: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 8(2), 304–315. <https://doi.org/10.24252/idaarah.v8i2.48976>
- Muhammad Aris. (2019). *Implementasi Pengimbasan Sistem Penjaminan Mutu Internal (Spmi) Sekolah Model Sekolah Menengah Pertama (Smp) A. Wahid Hasyim Tebuireng Jombang Ke Sekolah Imbas* [Skripsi]. UIN SUNAN AMPEL SURABAYA.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Evaluasi Sistem Pendidikan Oleh Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah (2022).
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (2021).
- Piranggada, T. H., Triyoso, M., Usman, N. K., Miad, M., Efendi, K., Aslamiah, A., & Cinantya, C. (2025). Sustainable quality culture in schools: A leadership perspective. *Curricula: Journal of Curriculum Development*, 4(2), 1679–1692. <https://doi.org/10.17509/curricula.v4i2.90927>
- Ramli, R. (2025). *Peran Evaluasi Diri Sekolah dalam Menjamin Mutu Pendidikan*.
- Setyawati Heni & Winart Ika. (2024). *Implementasi Kegiatan Pembiasaan peserta didik di MTs Raden Rahmat Selorejo Mojowarno*.
- Sherwina Ranisa, Ahmad Suriansyah, & Ratna Purwanti. (2025). Implementasi Rencana Strategis Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah. *GEMILANG: Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 5(1), 320–333. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v5i1.2691>
- Sugiarti, S. (2023). Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di SMA Negeri 1 Batang. *Jurnal Manajemen Pendidikan (JMP)*, 12(1). <https://doi.org/10.26877/jmp.v12i1.15295>
- Zahrok, A. L. N. (2020). Implementasi sistem penjaminan mutu internal di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 8(2), 196–204. <https://doi.org/10.21831/jamp.v8i2.31288>